

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir Tahun 2019, dunia dikejutkan oleh kemunculan virus jenis baru yang bernama *Corona Virus Diseases 19*, yang selanjutnya dikenal dengan virus Covid-19, virus ini awalnya muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.¹ Dengan penyebaran Virus ini yang begitu cepat World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan Covid-19 sebagai *pandemic* global.² Gambaran klinis mengenai gejala Covid-19 antara lain: demam, batuk, keringat, sakit tenggorokan, sakit kepala, kelelahan, diare, mual, kehilangan nafsu makan, kehilangan indra penciuman hingga sesak nafas.



Di Indonesia, kasus virus Covid-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus warga negara Indonesia yang terinfeksi virus Covid-19.³ Hingga akhirnya melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam

¹ Ririn Novita Putri, 2020, Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19, jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi 20(2), 705-709

² Glorya setyvani Putri, WHO Resmi Sebut Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Kompas.com (Diakses Pada 20 Januari 2022 Pukul 22.00 WIB)

³ RaKhmad Hidayatulloh Permana, Cerita Awal Corona di Indonesia, news.detik.com (Diakses Pada 25 Januari 2022 Pukul 15:23 WIB)

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional, presiden Joko Widodo menyatakan bahwa status Virus Covid-19 menjadi bencana Nasional.⁴ Tercatat hingga tanggal 25 Januari 2020, virus Covid-19 sudah menyebar di 227 negara, dengan sebanyak 352.796.704 kasus positif, dan 5.600.434 jiwa meninggal dunia.⁵

Sebagai upaya menanggulangi virus Covid-19, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai macam usaha di antaranya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis Mikro (PPKM). Kemudian sosialisasi pengenalan 5M, yaitu anjuran untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas⁶.

Namun demikian, usaha tersebut belum maksimal dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19. Oleh karena itu, pemerintah melakukan usaha vaksinasi kepada masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah juga menetapkan peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus*



⁴ CNN Indonesia, Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia, cnindonesia.com, (Diakses Pada 26 Januari 2022, Pukul 12:30 WIB)

⁵ Data Sebaran Covid 19 Kemenkes RI, <https://covid19.go.id/> (Diakses Pada 22 Januari 2022, pukul 19.00 WIB)

⁶ Tahfsin Alfarizi, 5M di Massa Pandemi Covid-10 di Indonesia, kemenkes.go.id (Dikases Padda 29 januari 2022, Pukul 22.27 WIB)

Disease 2019 (Covid-19) sebagai kebijakan lanjut guna mengatur kewenangan Pemerintah, Kementrian, Lembaga, dan Para Pejabat dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.⁷ Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁸ Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan vaksinasi demi mencegah penyebaran Virus Covid-19. Adapun perbandingan jumlah vaksinasi Covid 19 yang dilakukan pemerintahan Indonesia dengan negara-negara lain dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1. 1 Peringkat Penggunaan Dosis Vaksinasi di Dunia

⁷ Permenkes No. 10 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁸ Ibid

| No | Negara | Dosis Diberikan | Divaksinasi Lengkap | Persentase Populasi Divaksinasi Lengkap |
|----------|------------------|-----------------|---------------------|---|
| 1 | China | 3,04 M | 1,23 M | 87,0 % |
| 2 | India | 1,73 M | 753 jt | 54,6 % |
| 3 | Amerika Serikat | 547 jt | 213 jt | 64,7 % |
| 4 | Brazil | 378 jt | 152 jt | 71,7 % |
| 5 | Indonesia | 331 jt | 152 jt | 49,6 % |

Sumber: Data WHO 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan China merupakan negara yang paling berhasil dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 dengan jumlah dosis vaksin yang sudah diberikan sebanyak 3,4 Miliar dosis, sedangkan untuk jumlah vaksinasi yang sudah lengkap sebanyak 1,23 Miliar dan untuk persentase populasi divaksinasi lengkap sebanyak 87,0%. Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid -19, Indonesia menempati posisi ke lima dengan jumlah vaksinasi terbanyak yaitu sebanyak 331 juta dosis, namun persentase populasi divaksinasi lengkap sebesar 49,6 % sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Indonesia belum maksimal.

Belum maksimalnya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan suplai vaksin yang ada di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Menteri Kesehatan RI dalam wawancaranya bersama kompas.com tanggal 12 juli 2021.

“Terkait dengan program vaksinasi ini, mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya kenapa program vaksin di Indonesia lama. Hal ini bukan karena kita tidak memiliki anggaran tapi permasalahan ada

di suplai vaksinnya. Pada awal program vaksinasi selama 8 minggu, Indonesia hanya dapat menyuntikkan 10 juta vaksin.”⁹

Menurut Menteri Kesehatan, dalam bulan pertama program vaksinasi di awal tahun 2021, vaksin yang didapat Indonesia hanya 3 juta dosis. Kemudian pada bulan Juli vaksinasi yang disiapkan lebih dari 33 juta dosis, dengan target 1 juta vaksin per hari dapat terpenuhi.¹⁰ Meskipun suplai vaksin yang tersedia sudah cukup banyak, namun ternyata tingkat vaksinasi di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Kesehatan RI kepada Merdeka.com bahwa sebanyak 208.205.720 rakyat Indonesia ditargetkan pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap mendapatkan kekebalan kelompok terhadap COVID-19. Akan tetapi, hanya 57.409.303 orang yang telah mendapatkan dua dosis vaksinasi COVID-19. Dengan demikian, tingkat vaksinasi COVID di Indonesia baru mencapai 27,57 persen dari jumlah yang ditargetkan.¹¹

Belum maksimalnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, juga dipengaruhi oleh belum maksimalnya pelaksanaan vaksinasi pada tingkat Pemerintahan Provinsi. Salah satu Provinsi yang mendapat peringatan dari Menteri Kesehatan RI adalah Provinsi Sumatra Barat, hal ini disebabkan lantaran Provinsi Sumbar tercatat sebagai provinsi kedua terendah di antara 34 Provinsi lainnya dalam capaian program vaksinasi Covid-19 dosis pertama nasional.¹² Hal



⁹Gloria Setyani Putri, Program Vaksinasi Indonesia kenapa Lambat? Ini Jawaban Menkes Budi, kompas.com,(Diakses Pada 29 Januari 2021, Pukul 12:30 WIB)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dedi Rahmadi, Update Jumlah Vaksinasi di Indonesia Per 10 Oktober 2021, merdeka.com, (Diakses pada 1 Maret 2022, Pukul 17.45 WIB)

¹²CNN Indonesia, Menkes tegur Vaksin Dosis 1 Covid Sumbar Terendah Kedua di RI, cnnindonesia.com.(Diakses pada 1 Maret 2022, Pukul 16:00 WIB)

ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kutipan berikut:

“Kalau saya lihat, di Sumbar target yang divaksinasi ada 4.4 juta yang sudah divaksinasi. Dosis pertama 1,1 juta, dosis kedua sekitar 560 ribu. Jadi, saya minta tolong semua diajak untuk divaksinasi, ini bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga orang lain.”¹³

Setelah Sumbar mendapat peringatan dari Menkes per Oktober 2021, terjadi peningkatan pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari peringkat dua terendah ke peringkat 1 dari bawah, atau peringkat ke-23 dari 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Februari 2022 (Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Data Peringkat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
per 14 februari 2022

| No | Dosis 1 | | Dosis 2 | |
|----|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | Provinsi | Persentase | Provinsi | Persentase |
| 1 | DKI Jakarta | 147,51% | DKI Jakarta | 123,1% |
| 2 | Bali | 114,76% | Bali | 103,42% |
| 3 | DI. Yogyakarta | 110,07% | DI. Yogyakarta | 98,74% |
| 4 | Kepulauan Riau | 108,56% | Kepulauan Riau | 88,32% |
| 5 | Kalimantan Timur | 94,71% | Kalimantan Timur | 79,35% |
| 6 | Kep. Bangka Belitung | 93,35% | Jawa Tengah | 72,14% |
| 7 | Sumatera Selatan | 91,44% | Kep. Bangka Belitung | 72,1% |
| 8 | Kalimantan Utara | 91,02% | Kalimantan Utara | 68,76% |
| 9 | Kalimantan Tengah | 90,78% | Jawa Timur | 67,77% |
| 10 | Nusa Tenggara Barat | 90,34% | Jambi | 63,31% |
| 11 | Riau | 90,3% | Jawa Barat | 62,77% |
| 12 | Jawa Tengah | 90,37% | Sumatera Utara | 61,85% |
| 13 | Sumatera Utara | 90,23% | Banten | 61,77% |
| 14 | Banten | 89,47% | Nusa Tenggara | 61,64% |

¹³ Ibid.

| | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Barat | |
| 15 | Jambi | 89,36% | Riau | 61,35% |
| 16 | Jawa Timur | 89,05% | Kalimantan Tengah | 60,18% |
| 17 | Aceh | 88,44% | Bengkulu | 59,1% |
| 18 | Jawa Barat | 88,04% | Lampung | 58,3% |
| 19 | Lampung | 87,22% | Sumatera selatan | 57,66% |
| 20 | Gorontalo | 87,03% | Kalimantan Barat | 57,54% |
| 21 | Bengkulu | 86,96% | Sulawesi Utara | 56,57% |
| 22 | Kalimantan Selatan | 85,13% | Gorontalo | 54,95% |
| 23 | Sulawesi Utara | 84,91% | Sulawesi Selatan | 53,64% |
| 24 | Sumatera Barat | 83,78% | Sumatera Barat | 52,11% |
| 25 | Sulawesi Selatan | 82,49% | Nusa Tenggara Timur | 49,83% |
| 26 | Sulawesi Tengah | 81,99% | Kalimantan Selatan | 48,09% |
| 27 | Nusa Tenggara Timur | 81,49% | Sulawesi Tenggara | 47,94% |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 81,15% | Sulawesi Tengah | 46,75% |
| 29 | Kalimantan Barat | 80,46% | Sulawesi Barat | 44,17% |
| 30 | Maluku Utara | 79,05% | Aceh | 42,18% |
| 31 | Sulawesi Barat | 74,34% | Maluku Utara | 41,94% |
| 32 | Maluku | 67,49% | Papua Barat | 38,46% |
| 33 | Papua Barat | 57,96% | Maluku | 37,79% |
| 34 | Papua | 30,93% | Papua | 22,39% |

Sumber : Data Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Meskipun terjadi peningkatan, namun dapat dikatakan peningkatan yang terjadi belum terlalu signifikan. Jika kita melihat data di atas, persentase vaksinasi kedua Provinsi Sumatra Barat masih belum mencapai target *herd immunity* yaitu 70% persentase vaksinasi ke-dua sehingga dapat diambil kesimpulan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi sumatera Barat belum berjalan dengan baik. Adapun Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Persentase dan Jumlah Vaksinasi Covid-19 Pertama di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

| No. | Kabupaten/Kota | Persentase | Jumlah |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Kota Padang | 96,95% | 704.451 |
| 2 | Kabupaten Agam | 71,09% | 301.115 |
| 3 | Kabupaten Pesisir Selatan | 76,66% | 306.698 |
| 4 | Kabupaten Pasaman Barat | 81,66% | 271.971 |
| 5 | Kabupaten Padang Pariaman | 77,70% | 266.203 |
| 6 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 81,28% | 252.465 |
| 7 | Kabupaten Solok | 72,92% | 227.369 |
| 8 | Kabupaten Tanah Datar | 72,27% | 221.382 |
| 9 | Kabupaten Pasaman | 80,26% | 188.813 |
| 10 | Kabupaten Sijunjung | 84,95% | 157.241 |
| 11 | Kabupaten Dharmasraya | 85,82% | 153.844 |
| 12 | Kota Bukittinggi | 121,19% | 115.994 |
| 13 | Kabupaten Solok Selatan | 78,99% | 113.713 |
| 14 | Kota Payakumbuh | 96,16% | 105.835 |
| 15 | Kota Solok | 111,43% | 65.555 |
| 16 | Kota Pariaman | 99,02% | 73.905 |
| 17 | Kota Padang Panjang | 128,29% | 56.529 |
| 18 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 79,86% | 54.711 |
| 19 | Kota Sawahlunto | 104,27% | 54.015 |

Sumber : Data Kementerian Kesehatan Tahun 2022

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat jumlah vaksinasi Covid-19 pertama terbanyak adalah Kota Padang yaitu 704.451 orang dengan persentase 96,95 %. Untuk pelaksanaan vaksinasi ke dua di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Persentase dan Jumlah Vaksinasi Covid-19 Kedua di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

| No. | Kabupaten/Kota | Persentase | Jumlah |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Kota Padang | 62,54% | 454.435 |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 48,09% | 192.395 |
| 3 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 60,44% | 187.737 |
| 4 | Kabupaten Pasaman Barat | 55,70% | 185.511 |
| 5 | Kabupaten Agam | 37,94% | 163.895 |
| 6 | Kabupaten Tanah Datar | 50,40% | 154.382 |
| 7 | Kabupaten Solok | 43,28% | 134.950 |
| 8 | Kabupaten Padang Pariaman | 35,73% | 122.395 |
| 9 | Kabupaten Sijunjung | 59,50% | 110.131 |
| 10 | Kabupaten Pamanasa | 54,10% | 97.149 |
| 11 | Kabupaten Pasaman | 41,14% | 97.019 |
| 12 | Kabupaten Solok Selatan | 58,42% | 84.098 |
| 13 | Kota Payakumbuh | 68,53% | 75.433 |
| 14 | Kota Bukittinggi | 70,56% | 67.534 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 82,05% | 42.505 |
| 16 | Kota Solok | 71,16% | 40.588 |
| 17 | Kota Padang Panjang | 82,38% | 56.302 |
| 18 | Kota Pariaman | 43,19% | 32.234 |
| 19 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 45,05% | 30.864 |

Data :Kementerian Kesehatan 2022

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah vaksinasi terbanyak untuk vaksinasi kedua adalah Kota Padang dengan Jumlah 454.435 dan persentase 62,54%. Dari Tabel 1.3 dan 1.4 dapat dilihat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini terbukti dengan capaian vaksinasi Kota Padang tergolong tinggi baik pada vaksinasi pertama maupun kedua, yaitu untuk baksin pertama 96,95% untuk Vaksin pertama dan 62,54% untuk vaksin kedua.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang sangat penting mengingat Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat di mana tingkat aktivitas penduduk yang sangat tinggi sehingga peluang penyebaran Covid-19

sangat tinggi. Selain itu, Kota Padang juga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi di Sumatera Barat, adapun perbandingan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk |
|------------------------------|-----------------|
| Kota Padang | 913.448 |
| Kabupaten Agah | 531.202 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | 509.618 |
| Kabupaten Pasaman Barat | 436.313 |
| Kabupaten Padang Pariaman | 433.018 |
| Kabupaten Solok | 394.237 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | 385.634 |
| Kabupaten Tanah Datar | 373.693 |
| Kabupaten Pasaman | 303.103 |
| Kabupaten Sijunjung | 237.313 |
| Kabupaten Dharmasraya | 231.217 |
| Kabupaten Solok Selatan | 184.854 |
| Kota Payakumbuh | 141.184 |
| Kota Bukittinggi | 121.588 |
| Kota Pariaman | 95.294 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 88.389 |
| Kota Solok | 74.469 |
| Kota Sawahlunto | 65.687 |
| Kota Padang Panjang | 56.971 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Keberhasilan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sangatlah penting guna mencegah penyebaran kasus baru di Kota Padang dan mengurangi peluang

bertambahnya korban jiwa dari virus Covid-19 tersebut. Keberhasilan pengelolaan program vaksinasi Covid-19 di Kota Padang erat kaitanya dengan bagaimana proses manajemen program tersebut karena dengan proses manajemen yang baik maka pelaksanaan dari program yang direncanakan dari awal akan terlaksana dengan baik pula.

Program vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, namun dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan pada tingkatan daerah provinsi maupun tingkatan kabupaten/kota. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 merupakan tanggung jawab pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan. Pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki peran penting dalam berjalanya program tersebut, hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Padang memegang tanggung jawab urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam upaya meningkatkan angka Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang melakukan terobosan, diantaranya yaitu melakukan program vaksinasi Mobile, vaksinasi mobile merupakan upaya jemput bola ke masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Hj.Ferimulyani H, MBIomed:

“dalam rangka meningkatkan jumlah vaksinasi di Kota padang kami membuat program vaksinasi mobile, dimana dalam kegiatan vaksinasi ini, puskesmas selaku vaksinator langsung mendatangi untuk melakukan kegiatan. (Wawancara dengan Hj.Ferimulyani H, MBIomed selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang)

Dengan dilaksanakannya program vaksinasi Mobile ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan juga pemberian vaksinasi dapat menjangkau masarakat lebih luas. Selain vaksinasi mobile, terobosan lain yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang adalah dengan menghimbau masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin untuk membaawa dua lansia, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Hj.Ferimulyani H, MBIomed:

"Bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi tapi bukan termasuk golongan lansia maupun petugas pelayanan publik, dapat kita berikan vaksinasi namun harus membawa minimal dua orang lansia yang bersedia melakukan vaksinasi."¹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui untuk mencapai target kelompok usia lansia, Dinas Kesehatan memberikan himbauan kepada maasayakat yang ingin melakukan vaksinasi agar membawa dua orang lansia untuk divaksin, dengan demikian, Dinas Kesehatan dapat menjangkau kelompok umur lansia yang merupakan kelompok yang rentan akan menjadi korban dari virus Covid-19 untuk diberikan vaksin.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 Dinas kesehatan Kota Padang Memebentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021 melalui Keputusan kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor : 443/127.2/DKK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021, hal ini sesuai dengan

¹⁴ Irwan Rais Padang.go.id, DKK Akan Genjot Vaksinasi Lansia, padang.go.id.(Diakses Pada 25 Maret 2022 pukul 16.00 WIB)

pernyataan dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

“Pembentukan kelompok kerja ini didasarkan oleh SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam kelompok kerja ini dibentuk bidang-bidang yang mengerjakan kegiatan yang telah dituliskan di dalam SK Kepala Dinas tersebut.”(Wawancara dengan dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang pada 18 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui, dalam melaksanakan program vaksinasi ini, dinas kesehatan membentuk kelompok kerja yang dimana dalam kelompok kerja tersebut dibagi dalam berbagai bidang yang memilekaskan kegiatannya masing-masing, hal ini sejalan dengan salah satu proses manajemen yang dikemukakan oleh GR. Terry yaitu pengorganisasian dimana pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan.

Dalam pelaksanaan teknis Vaksinasi Covid-19 di lapangan dilaksanakan oleh Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang. Adapun Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Vaksinasi di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 6 : Puskesmas Dan Wilayah Tugas di Kecamatan Kota Padang

| No | Kecamatan | Puskesmas |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | Bungus | Bungus |
| 2 | Lubuk Kilangan | Lubuk Kilangan |
| 3 | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung |
| | | Pengambiran |
| 4 | Padang Selatan | Seberang Padang |

| | | |
|----|--------------|-----------------------|
| | | Pemancing |
| | | Rawang Barat |
| 5 | Padang Timur | Andalas |
| 6 | Padang Barat | Padang Pasir |
| 7 | Padang Utara | Ulak Karang |
| | | Air Tawar |
| | | Alai |
| 8 | Nanggalo | Nanggalo |
| | | Lapai |
| 9 | Kuranji | Belimbing |
| | | Kuranji |
| | | Ambacang |
| 10 | Pauh | Pauh |
| 11 | Koto Panjang | Sandangin |
| | | Lubuk Buaya |
| | | Koto Panjang Iku Koto |
| | | Anak Air |
| | | Dadok Tunggul Hitam |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2022

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat terdapat 23 puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan yang berwilayah tugas di 11 kecamatan Kota Padang. Adapun capaian pelaksanaan vaksinasi covid-19 per-kecamatan di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Capaian Vaksinasi Per-Kecamatan di Kota Padang
 (31 Desember 2021)

| No | Kecamatan | Dosis 1 | Dosis 2 | % vaksin 1 | % Vaksin 2 |
|----|----------------|---------|---------|------------|------------|
| 1 | Bungus | 11.957 | 7785 | 59,73% | 38,89% |
| 2 | Koto Tengah | 78.562 | 54.551 | 55,13% | 38,28% |
| 3 | Kuranji | 64.896 | 45.329 | 58,03% | 40,53% |
| 4 | Lubuk Begalung | 58.629 | 44.100 | 62,69% | 47,16% |
| 5 | Lubuk Kilangan | 42.944 | 19.613 | 62,59% | 45,67% |
| 6 | Nanggalo | 27.798 | 20.928 | 55,93% | 42,11% |
| 7 | Padang Barat | 23.801 | 18.614 | 62,87% | 49,17 % |
| 8 | Padang Selatan | 33.774 | 26.047 | 68,05% | 52,48% |
| 9 | Padang Timur | 39.910 | 29.885 | 60,03% | 44,95% |
| 10 | Padang Utara | 27.383 | 20.667 | 46,12% | 34,83% |
| 11 | Pauh | 30.493 | 22.513 | 57,80% | 42,67% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2022

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Per-Kecamatan di Kota Padang masih belum maksimal di mana masih terdapat kecamatan dengan persentase vaksinasi Covid-19 yang masih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Untuk kecamatan dengan persentase vaksinasi Covid-19 yang paling tinggi adalah Kecamatan Padang Selatan di mana pada vaksinasi pertama sebesar 68,05% dan untuk vaksinasi kedua dengan persentase 52,48%, Kemudian kecamatan dengan capaian vaksinasi terendah di Kota Padang adalah Kecamatan Padang Utara dengan persentase vaksinasi pertama sebesar 46,12% sedangkan untuk vaksinasi kedua sebesar 34,83 %. Pelaksanaan vaksinasi di tingkat kecamatan tentu tidak lepas dari peranan Puskesmas selaku Pelaksana vaksinasi yang terdapat di setiap kecamatan di kota Padang, adapun pelaksanaan vaksinasi pada puskesmas di kota padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua Pada puskesmas Puskesmas di Kota Padang

| No | Puskesmas | Dosis 1 | Dosis 2 | Total |
|----|-----------------|---------|---------|-------|
| 1 | Andalas | 22582 | 15291 | 37873 |
| 2 | Lubuak Buaya | 20221 | 14171 | 34392 |
| 3 | Lubuk Kilangan | 19852 | 14116 | 33968 |
| 4 | Pauh | 19537 | 13026 | 32563 |
| 5 | Padang Pasir | 18183 | 13845 | 32028 |
| 6 | Pegambiran | 17403 | 13752 | 31128 |
| 7 | Lubuk Begalung | 17308 | 11810 | 29118 |
| 8 | Siteba | 16886 | 11866 | 28752 |
| 9 | Ambacang | 16481 | 12130 | 28611 |
| 10 | Air Tawar | 15387 | 10975 | 26362 |
| 11 | Alai | 13326 | 10849 | 24175 |
| 12 | Air Dingin | 13474 | 10134 | 23608 |
| 13 | Belimbing | 14391 | 9210 | 23601 |
| 14 | Seberang Padang | 13138 | 10335 | 23473 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|
| 15 | Ulak Karang | 12390 | 10265 | 22655 |
| 16 | Rawang Barat | 13398 | 9047 | 22445 |
| 17 | Dadok | 12296 | 9166 | 21462 |
| 18 | Anak Air | 12440 | 8941 | 21381 |
| 19 | Lapai | 10824 | 9079 | 19903 |
| 20 | Kuranji | 11812 | 7404 | 19216 |
| 21 | Bungus Taluak Kabuang | 11147 | 7980 | 19127 |
| 22 | Ikur Koto | 11040 | 8023 | 19063 |
| 23 | Pemancangan | 9613 | 6994 | 16607 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan jumlah yang paling banyak dilaksanakan pada Puskesmas di Kota Padang adalah Puskesmas Andalas di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan jumlah vaksinasi pertama sebanyak 22582 dosis dan Pada Vaksinasi Kedua sebanyak 15.291 dosis, kemudian untuk posisi kedua yaitu puskesmas Lubuk Buaya dengan jumlah vaksinasi pertama sebanyak 20221 dosis dan untuk Vaksinasi Kedua sebanyak 14.171 dosis, Kemudian untuk Posisi ketiga ditempati oleh Puskesmas Lubuk Kilangaan dengan jumlah Pada Dosis pertama yaitu sebesar 19.852 dosis dan untuk dosis kedua sebesar 14.116 dosis.

Dalam melaksanakan perencanaan Program Vaksinasi Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Padang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sumber daya yang akan digunakan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Tut Wuri Handayani selaku Kepala bidang pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang :

“Sebelum melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19, tentunya kami melakukan perencanaan supaya kegiatan vaksinasi ini berjalan dengan baik, pada perencanaan kami

memrencanakan berbagai hal, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana waktu, tempat dan lain sebagainya”.(hasil Wawancara dengan ibuk Tut Wuri Handayani SKM.MKes, 23 Februari)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perencanaan Dinas Kesehatan Kota Padang telah melakukannya dengan baik yaitu dengan menganalisa sumber daya yang diperlukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dalam fungsi perencanaan perlu menganalisa sumberdaya yang akan digunakan dalam pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 ini. Adapun untuk sumberdaya tersebut adalah; Manusia (*Man*), Sumber Dana (*Money*) dan alat-alat (*Material*). Dalam melaksanakan program vaksinasi covid-19 Dinas kesehatan membentuk kelompok kerja yang melaksanakan program ini, hal ini juga disampaikan oleh dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

Pada pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini, Dinas Kesehatan membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor: 443/127.2/DKK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021. (Hasil Wawancara dengan buk dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang pada 18 Mei 2022)

Kemudian, dalam meningkatkan pemahaman tim pelaksana teknis vaksinasi Covid-19, Dinas Kesehatan Kota Padang memeberikan pelatihan kepada puskesmas puskesmas yang ada di Kota padang mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi tersebut, Hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibuk Handayani

Selaku Kepala Kepala Bidang Pelaksanaan Pokja Vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

“Ada, kami memberikan pelatihan pada puskesmas puskesmas yang akan melakukan vaksinasi ini untuk memberikan pemahaman teknis vaksinasi tersebut” (hasil Wawancara dengan ibuk Handayani, 25 Februari 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberikan pelatihan pemahaman teknis vaksinasi kepada puskesmas puskesmas kota padang sebelum melakukan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk memahami teknis dari pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Untuk sumberdaya sumber dana (*Money*), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan demikian dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini. Untuk sumberdaya Alat Alat (*Material*), bersumber dari dua sumber yakni dari pusat maupun dari Dinas Kesehatan itu sendiri.

Pada variabel pengorganisasian terdapat kegiatan pembagian kerja, adapun dalam program Vaksinasi Covid-19 ini pembagian kerja telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Nomor: 443/127.2/DKK/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang Tahun 2021, hal ini senada dengan

penyataan dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

:dalam kelompok kerja ini kami membagi tugas berdasarkan posisi/jabatan sebelumnya yang anggota tempati di dalam dinas, sehingga para anggota kelompok kerja lebih memahami tugas mereka di dalam kelompok kerja ini” (wawancara dengan ibuk dr. Melinda Wilma MPPM selaku ketua pelaksana kelompok kerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kota Padang pada 18 Mei 2022)

Dari wawancara tersebut, pembagian kerja yang dilakukan dalam kelompok kerja telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan posisi anggota kelompok kerja keahlian yang sesuai dengan jabatannya di dalam dinas sehingga para anggota dapat memahami tugas yang akan dilaksanakan dengan baik.

Kemudian pada fungsi penggerakan diperlukan adanya komunikasi agar pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik. Arah informasi dan perintah yang jelas dapat dilakukan dengan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, secara formal maupun tidak formal. Adanya transfer informasi dalam pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dilakukan dalam rapat secara formal maupun melalui Telephone, seperti yang dijelaskan oleh ibuk tut Wuri Handyani selaku Kepala bidang Pelaksanaan pokja Vaksinasi Covid-19 Kota Padang :

“Biasanya secara formal kami melakukan komunikasi dalam rapat, kadang kadang kami juga melakukan komunikasi lewat telepon kepada puskesmas supaya lebih efektif.”(hasil Wawancara dengan ibuk Handayani, 25 Februari 2022).

Dari wawancara diatas dapat dilihat pentingnya komunikasi secara langsung seperti dalam rapat. Namun untuk menggerakan anggota juga dapat

dilakukan dengan komunikasi non formal seperti menggunakan telephone yang dinilai efektif karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, asalkan komunikasi terjalin dengan baik.

Kemudahan pada Fungsi Pengawasan, Dinas kesehatan Kota Padang membentuk tim Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tim tersebut bertugas untuk mengawasi teknis pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di puskesmas puskesmas Kota Padang seperti yang dijelaskan oleh Dr Desi M Sidik Selaku ketua Bidang monitoring dan evaluasi kelompok Kerja pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kota Padang:

“Dalam melakukan pengawasan, Dinas Kesehatan membentuk tim dalam mengawasi pelaksanaan vaksinasi di puskesmas agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan maka kami memberi teguran atau peringatan kepada puskesmas yang bersangkutan (hasil Wawancara dengan ibuk Dr Desi M Sidik, 25 Februari 2022)

Bedasarkan wawancara tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Dinas Kesehatan Kota Padang Kepada Puskesmas selaku pelaksana teknis diiringi dengan pemberian sanksi berupa teguran atau nasehat..Dari fenomena yang peneliti temukan peneliti menemukan kecocokan fenomena dilapangan dengan teori fungsi manajemen menurut G.R Terry yaitu perencanaan (*Planning*), Pengorganisaian (*Organizzing*), Penggerakan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*). Dengan capaian positif dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Padang peneliti memfokuskan pada kajian manajemen dengan judul **Manajemen Program Vaksinasi Covid-19 Oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Manajemen Program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Padang?”

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Manajemen Program Vaksinasi Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Padang.

1. 4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik, dengan demikian peneliti dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa administrasi publik lainnya, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang relevan yang selanjutnya terkait dengan penelitian ini.

1. 4. 2 .Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan, acuan, daan menjadi sumbangan fikiran bagi instansi terkait.

